BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2009). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan).

Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau GDP yang terus-menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan GDP, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Balisacan,2003 Pertumbuhan ekonomi memang penting, strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih lengkap harus mengambilmfaktor yang relevan, dalam konteks desentralisasi, analisis subnasional dapat menjadi pendekatan instruktif untuk memeriksa pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan

Mengeksplorasi tantangan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh ekonomi yang melimpah dalam tenaga kerja dan sumber daya alam dalam ekonomi global yang semakin maju, bahwa penghargaan spesialisasi yang semakin didominasi oleh beberapa negara berkembang yang sangat besar, terutama Cina (Coxhead,2008). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk Negara Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Marhaeni, 2014).

Dalam proses pembangunan selalu diupayakan pertumbuhan ekonomi adalah setinggi mungkin (Dayuh, 2012). Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. (Odhiambo, 2009).

Nurudeen (2010) menyatakan bahwa, pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat besar melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (Dalamagas, 2010). Pembangunan itu sendiri memiliki Pertumbuhan ekonomi memang penting, strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih lengkap harus mengambil faktor yang relevan, dalam konteks desentralisasi, analisis subnasional dapat menjadi pendekatan instruktif untuk memeriksa pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan (Balisacan, 2003).

Mengeksplorasi tantangan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh ekonomi yang melimpah dalam tenaga kerja dan sumber daya alam dalam ekonomi global yang semakin maju, bahwa penghargaan spesialisasi yang semakin didominasi oleh beberapa negara berkembang yang sangat besar, terutama Cina (Coxhead, 2008). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk Negara Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Marhaeni, 2014). Dalam proses pembangunan selalu diupayakan pertumbuhan ekonomi adalah setinggi mungkin (Dayuh, 2012). Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. (Odhiambo, 2009). Nurudeen (2010) menyatakan bahwa, pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat besar melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (Dalamagas, 2010).

Tabel. 1 Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat Tahun 2018-2020 (Persen)

Tahun	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	5,14	5,05	-1,60

Sumber : BPS Sumatera Barat (2018-2020)

Berdasarkan data pada tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi yang paling tinggi meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,14 sedangkan pada tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi menurun sebesar 5,05 sedangkan pada tahun 2020 perekonomian menurun drastis yaitu sebesar -1,60

Selanjutnya tingkat kemiskinan, menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

**Tabel. 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
(Persen)**

Wilayah	2020	2019	2018
SUMATERA BARAT (Provinsi)	6.28	6.42	6.65
Kepulauan Mentawai	14.35	14.43	14.44
Pesisir Selatan	7.61	7.88	7.59
Kab.Solok	7.81	7.98	8.88
Tanah Datar	4.40	4.66	5.32
Padang Pariaman	6.95	7.10	8.04
Agam	6.75	6.75	6.76
Lima Puluh Kota	6.86	6.97	6.99
Pasaman	7.16	7.21	7.31
Solok Selatan	7.15	7.33	7.07
Pasaman Barat	7.04	7.14	7.34
Padang	4.40	4.48	4.70
Kota Solok	2.77	3.24	3.30
Sawahlunto	2.16	2.17	2.39
Padang Panjang	5.24	5.60	5.88
Bukittinggi	4.54	4.60	4.92
Payakumbuh	5.65	5.68	5.77
Pariaman	4.10	4.76	5.03

Sumber : BPS Sumatera Barat (2018-2020)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa berdasarkan lokasi tempat tinggal kabupaten/kota, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2018 cukup tinggi yaitu besar 6,65. sedangkan pada tahun 2019 tingkat kemiskinan menurun yaitu sebesar

6,42. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan menurun drastis yaitu sebesar 6,28 Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2018 yaitu kepulauan mantawai yaitu sebesar 14,44. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah tahun 2018 adalah sawahlunto dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,39. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan tertinggi yaitu kepulauan mantawai dengan tingkat kemiskinan 14,43, sedangkan yang terendah pada tahun 2019 adalah sawahlunto dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,17. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan tingkat kemiskinan disebabkan oleh perbedaan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan lokasi tempat tinggal.

Pertumbuhan ekonomi bersumber dari pendapatan penduduknya, maka dalam kaitan ini (Mankiw, 2000). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran. Jika semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Upah juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu daerah, karena rendahnya tingkat upah dapat pula menjadi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Bali. Penetapan tingkat upah merupakan kewenangan dari pemerintah yang berpengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan oleh

pemerintah, maka akan menyebabkan semakin sedikit pula jumlah tenaga kerja yang bekerja (Alghofari, 2009).

Tabel. 3 Perkembangan Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat (Rupiah)

Provinsi	2017	2018	2019
Sumatera Barat	1.949.284,81	2.119.067	2.289.228

Sumber : BPS *Sumatera Barat (2018-2020)*

Tabel 3. dapat dilihat bahwa Upah Minimum pada tahun 2017 meningkat yaitu sebesar Rp 1.949.284.81 sedangkan pada tahun 2018 upah minimum di Sumatera barat menurun sebesar Rp 2.119.067 sedangkan pada tahun 2019 upah minimum meningkat lebih tinggi dari pada tahun 2018. Kebutuhan Hidup Minimum seharusnya merupakan acuan untuk menetapkan standar upah minimum suatu daerah. Ini membuktikan kurangnya kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik penduduknya yang pada akhirnya memicu masalah-masalah yang lain seperti kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi berasal dari para penduduk yang memiliki pendapatan dari pekerjaan yang mereka miliki, Maka selanjutnya kita bisa mengkaji pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi . Dengan meningkatnya angka pengangguran maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyianyiakan barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran” (Samuelson, 2004). Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan dan tidak berperan dalam proses produksi barang dan jasa (Mankiw,2006:131). Menurut Sukirno (2010:14), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari

pekerjaan, tetapi belum memperolehnya.

Pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dengan ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, sehingga dapat berdampak pada jumlah pendapatan asli daerah. Selain itu juga banyaknya pengangguran dapat berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Maka dari itu masalah pengangguran dapat berdampak buruk, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Indikator yang sering digunakan oleh pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dalam bidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana tingkat pengangguran terbuka merupakan nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan.

Tabel. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Wilayah	2019	2018	2017
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5.33	5.55	5.58
Kepulauan Mentawai	2.92	2.27	1.96
Pesisir Selatan	5.84	5.85	5.95
Kab.Solok	4.65	5.92	6.05
Sijunjung	3.68	3.20	3.32
Tanah Datar	3.14	3.86	3.72
Padang Pariaman	5.97	6.90	6.65
Agam	4.72	4.82	4.23
Lima Puluh Kota	2.28	2.70	2.60
Pasaman	5.21	5.88	6.81
Solok Selatan	4.91	5.85	5.54
Dharmasraya	5.08	3.94	3.69
Pasaman Barat	4.64	3.37	3.99

Padang	8.76	9.18	9.44
Kota Solok	7.09	5.97	5.88
Sawahlunto	6.82	5.75	6.19
Padang Panjang	4.35	5.28	5.43
Bukittinggi	6.14	7.15	6.94
Payakumbuh	4.11	3.78	3.45
Pariaman	5.42	5.72	5.97

Sumber : BPS Sumatera Barat (2017-2019)

Dari Tabel 4 diatas terlihat bahwa berdasarkan lokasi tempat tinggal kabupaten/kota, tingkat pengangguran di Sumatera Barat tahun 2017 cukup tinggi yaitu sebesar 5,58 sedangkan pada tahun 2018 tingkat pengangguran menurun yaitu sebesar 5,55 sedangkan tahun pada tahun 2019 tingkat pengangguran menurun drastis yaitu sebesar 5,33 Kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran tertinggi tahun 2017 yaitu padang yaitu sebesar 9.44 Sedangkan tingkat pengangguran terendah tahun 2017 adalah kepulauan mentawai dengan tingkat pengangguran sebesar 1,96. Pada tahun 2018. tingkat pengangguran tertinggi yaitu kota padang dengan tingkat pengangguran 9,18 sedangkan yang terendah pada tahun 2018 adalah kepulauan mentawai dengan tingkat pengangguran sebesar 2.27.terdapat perbedaan tingkat pengangguran yang diterima oleh kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan tingkat pengangguran yang diterima oleh masyarakat berdasarkan lokasi tempat tinggal.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut

Berdasarkan uraian diatas latar belakang serta adanya dukungan hasil sejumlah penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berjudul: analisis pengaruh tingkat kemiskinan, upah, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi. (studi kasus sematra barat 1990-2020)